

PROMOSI KESEHATAN PADA KEHIDUPAN *NEW NORMAL* PANDEMI COVID-19

13

Rahmi Yuningsih

Abstrak

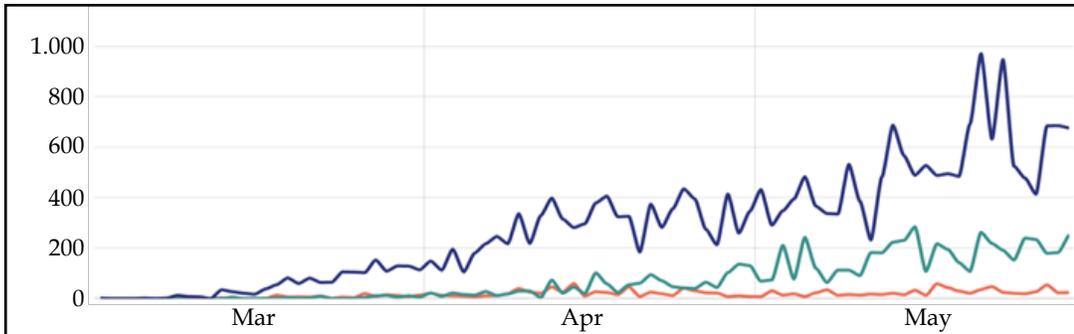
Grafik penyebaran Covid-19 belum menunjukkan tren penurunan namun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penerapan new normal pada sektor perkantoran, industri, dan perdagangan serta memberikan kewenangan pada 102 daerah dengan zona hijau untuk menerapkan skenario new normal. Kondisi ini membuat publik menghadapi dilema antara kepentingan ekonomi dan kekhawatiran meningkatnya penularan Covid-19. Tulisan ini membahas upaya meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi kehidupan new normal melalui optimalisasi promosi kesehatan. Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dan informasi yang kurang transparan, peran semua elemen masyarakat menjadi sangat penting dalam menegakkan disiplin masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan. DPR RI melalui Komisi IX dan Tim Pengawas Covid-19 dapat mengawasi pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan yang mendukung pencegahan Covid-19.

Pendahuluan

Sudah tiga bulan sejak diumumkannya kasus pertama Covid-19 di Indonesia tanggal 2 Maret 2020, jumlah kasus per hari masih fluktuatif dan belum menunjukkan tren penurunan. Terlebih setelah momen Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 24 Mei 2020, dikhawatirkan akan terjadi peningkatan kasus dalam satu hingga dua minggu ke depan. Grafik 1 menunjukkan persebaran Covid-19 yang meliputi kasus terkonfirmasi, sembuh, dan meninggal sejak bulan Maret hingga Mei 2020.

Kasus Covid-19 hingga 9 Juni 2020 bertambah 1.043 kasus sehingga menjadi 33.076 kasus. Jumlah sembuh bertambah 510 orang menjadi 11.414 orang sedangkan jumlah meninggal bertambah 40 orang menjadi 1.923 orang. Jumlah Pasien dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 14.108 orang dan jumlah Orang dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 38.394 orang yang tersebar di 34 provinsi dan 422 kabupaten/kota (covid19.go.id, 3 Juni 2020).





Grafik 1, Persebaran Covid-19 per Hari Selama Tiga Bulan

Sumber: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

Di tengah masa pandemi, pemerintah mengeluarkan protokol kesehatan pada situasi *new normal* tertanggal 20 Mei 2020 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi dan Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha. Pemerintah memberikan kewenangan kepada 102 kabupaten/kota dengan zona hijau untuk beraktivitas dan aman dari Covid-19 (Kompas, 31 Mei 2020).

Rencana pengurangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam skenario *new normal* membuat publik menghadapi dilema antara kepentingan ekonomi dan kekhawatiran penularan Covid-19 pada saat kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah. Tulisan ini membahas upaya meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi kehidupan *new normal*

melalui optimalisasi promosi kesehatan.

Indikator *New Normal* WHO dan Nasional

Akhir pandemi Covid-19 belum dapat dipastikan hingga vaksin ditemukan, diproduksi secara massal dan digunakan pada semua orang hingga terjadi kekebalan tubuh yang optimal. PT Bio Farma selaku BUMN kefarmasian Indonesia akan mulai melakukan tahapan uji praklinis vaksin Covid-19 pada hewan tahun 2021 mendatang. Sedangkan data WHO menunjukkan bahwa hingga 30 Mei 2020 telah ada 10 kandidat vaksin yang sedang dalam tahap uji klinis atau uji kepada manusia yang dikembangkan oleh Universitas Oxford, Beijing Institute of Biotechnology, NIAID, Wuhan Institute of Biological Product/Sinopharm, Beijing Institute of Biological Product/Sinopharm, Sinovac, Novavax, Pfizer, Chinese Academy of Medical Sciences, dan Inovio Pharmaceuticals.

Selain itu, terdapat 121 kandidat vaksin yang sedang dalam tahap praklinis (who.int, 30 Mei 2020). Sementara dampak dari pandemi terus meningkat terutama pada sektor ekonomi sehingga kebijakan *new normal* pasti akan

diberlakukan walaupun belum ada kepastian waktu. Sebelum pandemi Covid-19, manusia sudah hidup berdampingan dengan virus, bakteri dan mikroorganisme lainnya penyebab penyakit menular seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, *common flu* dan lainnya.

Skenario *new normal* telah digaungkan di segala sektor dalam memberikan kebebasan aktivitas ekonomi dan sosial dengan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan yang ketat. WHO memberikan enam kriteria *new normal*, yaitu (1) penularan Covid-19 sudah terkendali; (2) sistem kesehatan dapat mendeteksi, menguji, mengisolasi, melacak kasus dan mengkarantina pasien Covid-19; (3) risiko penularan dapat dikurangi terutama di tempat dengan kerentanan tinggi seperti panti jompo, fasilitas kesehatan mental dan tempat keramaian; (4) upaya pencegahan di lingkungan kerja seperti jaga jarak fisik, fasilitas cuci tangan, serta etika saat bersin dan batuk; (5) pencegahan kasus Covid-19 dari luar negeri; serta (6) imbauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam masa transisi *new normal* (who.int, 16 April 2020). Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas menggunakan kriteria pengendalian epidemiologi; sistem kesehatan; dan *surveilans* (bappenas.go.id, 29 Mei 2020).

Ketika kasus Covid-19 menunjukkan tren penurunan dalam beberapa waktu, masyarakat dapat beraktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, antara lain menggunakan masker, sering mencuci tangan, menggunakan *hand sanitizer*, menjaga jarak aman fisik, mengecek suhu tubuh, dan

menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Hal ini untuk menghindari terjadinya gelombang kedua dan gelombang-gelombang selanjutnya yang lebih berbahaya, mematikan, dan melumpuhkan sistem pelayanan kesehatan nasional. Walaupun pengurangan PSBB akan diberlakukan, tidak menutup kemungkinan PSBB akan diberlakukan kembali jika terjadi peningkatan kasus dalam rentang waktu hingga tahun 2022 saat vaksin dan terapi definitif Covid-19 diterapkan secara massal.

Upaya Promosi Kesehatan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat sebelum pandemi Covid-19 masih rendah. PHBS terdiri dari kebiasaan cuci tangan memakai sabun, konsumsi makanan sehat, aktivitas fisik, istirahat yang cukup, air bersih, sanitasi layak, tidak merokok, dan lain-lain. Data Kementerian Kesehatan Tahun 2019 menunjukkan bahwa sebesar 55% rumah tangga di Indonesia mempraktikkan PHBS dan 69,27% rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak. Ketika pandemi Covid-19 terjadi, masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik sosial yang beragam, mulai dari kelompok usia, tingkat pendidikan, status ekonomi, terpapar internet/media massa, lingkungan sosial, budaya, suku, dan lain-lain, memiliki pemahaman dan sikap yang beragam terhadap pandemi Covid-19. Pemahaman dan sikap yang terbentuk dapat memengaruhi tindakan/perilaku masyarakat. Tidak semua anggota masyarakat patuh pada protokol kesehatan. Seperti momen sebelum Hari Raya Idul Fitri, masyarakat memadati pasar untuk memenuhi

kebutuhannya sehingga kasus Covid-19 melonjak pada klaster pasar di Provinsi Kalimantan Selatan dan Jawa Barat.

Krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah yang terjadi sejak awal penanganan Covid-19, ditambah informasi yang kurang transparan dan kebijakan yang selalu berubah-ubah, dikhawatirkan akan membuat masyarakat menjadi resisten terhadap setiap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan *new normal*. Hal ini membuat peran semua elemen masyarakat menjadi sangat penting dalam menegakkan PHBS serta patuh pada protokol kesehatan. Oleh karenanya, dibutuhkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Covid-19. Menurut Permenkes Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, dalam penguatan pemberdayaan masyarakat, upaya promosi kesehatan menjadi pilar utama pembangunan kesehatan, bahkan menjadi faktor penentu pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Permenkes tersebut, promosi kesehatan adalah proses memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, memengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal. Promosi kesehatan dilaksanakan dalam pengembangan kebijakan publik yang mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat; menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang mendukung derajat kesehatan yang optimal; meningkatkan gerakan masyarakat

untuk mengendalikan faktor yang memengaruhi kesehatan; mengembangkan individu agar tahu, mau, dan mampu membuat keputusan yang efektif dalam memelihara; meningkatkan, dan mewujudkan derajat kesehatan yang optimal serta menata kembali sistem pelayanan kesehatan masyarakat agar lebih mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengesampingkan aspek kuratif dan rehabilitatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan promosi kesehatan sebagai bagian dari Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) esensial merupakan salah satu tugas puskesmas di wilayah kerjanya. Namun pada era BPJS ini, tugas puskesmas lebih kepada Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), yaitu menyaring masalah kesehatan dasar individu sebelum dirujuk ke rumah sakit daripada fungsi pemberdayaan masyarakat (promosi kesehatan). Selain itu, terbatasnya jumlah tenaga promosi kesehatan ataupun tumpang tindihnya pekerjaan tenaga kesehatan lain yang juga menjalankan pekerjaan promosi kesehatan menjadi kendala puskesmas dalam memberikan pelayanan UKM kepada masyarakat, padahal peran puskesmas sangat penting dalam memberdayakan masyarakat di tengah pandemi ini.

Terlepas dari kendala tersebut, promosi kesehatan yang dilakukan puskesmas membutuhkan peran aktif para kader kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, jaringan masyarakat sipil, organisasi masyarakat, dan petugas keamanan setempat. Masyarakat akan lebih patuh pada protokol kesehatan jika

semua elemen masyarakat tersebut selalu aktif dalam mengimbau dan menerapkan protokol kesehatan di wilayahnya. Terlebih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) sebagai kebijakan pada masa transisi menuju *new normal* untuk membatasi aktivitas warga tingkat RT/RW dengan zona merah Covid-19 (Media Indonesia, 3 Juni 2020). Oleh karena itu, peran aktif dari semua elemen masyarakat dalam bentuk rembuk warga sangat diperlukan untuk mengatur keluar masuk orang di wilayah tersebut.

Kesiapan masyarakat menghadapi *new normal* tidak hanya terlihat dari aspek sosial, melainkan juga terlihat secara fisik dan mental. Fisik sehat yang senantiasa menerapkan PHBS dan protokol kesehatan serta mental yang tetap tenang dan terhindar dari gangguan kecemasan selama pandemi Covid-19 menjadi cerminan kesiapan masyarakat dalam menghadapi kehidupan *new normal* mendatang. Tentunya selain kesiapan masyarakat, penerapan *new normal* juga memerlukan kesiapan pemerintah daerah dalam segala aspek, termasuk ketersediaan fasilitas dan sumber daya kesehatan.

Penutup

Rencana pemerintah mengurangi PSBB melalui skenario *new normal* harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati dengan memperhitungkan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Rendahnya perilaku masyarakat yang mendukung hidup bersih dan sehat menjadi tantangan dalam masa transisi menuju *new normal*.

Promosi kesehatan sebagai pilar utama pembangunan kesehatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek perubahan dapat dioptimalkan dalam upaya meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi tatanan *new normal*.

Pada era BPJS ini tugas puskesmas lebih pada menyaring masalah kesehatan dasar individu sebelum dirujuk ke rumah sakit daripada fungsi pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya. DPR RI melalui Komisi IX dan Tim Pengawas Covid-19 dapat mengawasi kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat yang menjadi tugas puskesmas.

Referensi

- "Bio Farma to Start Pre-clinical Trial for Covid-19 Vaccine in 2021", 22 April 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/22/bio-farma-to-start-pre-clinical-trial-for-covid-19-vaccine-in-2021.html>, diakses 4 Juni 2020.
- "Draft Landscape of Covid-19 Candidate Vaccines", 30 Mei 2020, <https://www.who.int/who-documents-detail/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines>, diakses 4 Juni 2020.
- "Habis PSBB, Ada PSBL", *Media Indonesia*, 3 Juni 2020, hal. 5.
- "Kasus Positif Covid-19 Naik 684, Pasien Sembuh 471, Meninggal 35", 3 Juni 2020, <https://covid19.go.id/p/berita/kasus-positif-covid-19-naik-684-pasien-sem-buh-471-meninggal-35>, diakses 4 Juni 2020.
- "Kedisiplinan Penentu Keberhasilan", *Kompas*, 31 Mei 2020, hal. 1.

Kementerian Kesehatan. 2019. *Profil Kesehatan Indonesia 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

“Peta Sebaran”, 4 Juni 2020, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses 4 Juni 2020.

“Terapkan Protokol Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, Bappenas Dorong Contactless dan Cashless Society”, 29 Mei 2020, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/terapkan-protokol-masyarakat-produktif-dan-aman-covid-19-bappenas-dorong-contactless-dan-cashless-society/>, diakses 4 Juni 2020.

“Transition to a ‘New Normal’ During the Covid-19 Pandemic Must be Guided by Public Health Principles”, 16 April 2020, <http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2020/statement-transition-to-a-new-normal-during-the-covid-19-pandemic-must-be-guided-by-public-health-principles>, diakses 4 Juni 2020.



Rahmi Yuningsih
rahmi.yuningsih@dpr.go.id

Rahmi Yuningsih, SKM, MKM menyelesaikan pendidikan sarjana kesehatan masyarakat dengan peminatan manajemen rumah sakit di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2009 dan pendidikan magister kesehatan masyarakat dengan peminatan kebijakan dan hukum kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2014. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda kepakaran kesehatan masyarakat pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang publikasikan melalui buku dan jurnal antara lain “Strategi Promosi Kesehatan dalam Menurunkan Angka Kematian Balita di Provinsi Gorontalo Tahun 2017”, “Penguatan Kendali Pemerintah Terhadap Peredaran Obat dan Makanan” (2017) dan “Penguatan FKTP dalam Membangun Kesehatan Keluarga” (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.